

BAB VI

KESIMPULAN DAN SARAN

6.1 Kesimpulan

Berdasarkan Temuan yang telah peneliti lalui dalam hal ini maka peneliti memberikan kesimpulan bahwa strategi pemerintah nagari mandeh dalam mewujudkan mangrove sebagai destinasi wisata pada sejauh ini masih terkendala dengan izin lingkungan. Hal itu sejalan dengan teori yang dipaparkan oleh Kotten yang terdiri dari strategi organisasi dalam strategi yang diterapkan oleh pemerintah nagari yang begitu maksimal dalam menjadikan wisata mangrove tersebut, hal tersebut dilihat dengan adanya yaitu dengan lahan yang akan dijadikan wisata mangrove tersebut memiliki sepenuhnya oleh pemerintah nagari yang mengelolanya. Begitu juga dengan visi dan misi yang dikatakan oleh nagari yakni menjadikan wisata mangrove tersebut sebagai lahan dalam menambah mata pencarian dari masyarakat setempat, hal tersebut dapat menumbuhkan perekonomian yang sangat baik bagi masyarakat di nagari mandeh tersebut. Perencanaan pembangunan wisata mangrove ini telah sesuai dengan visi dan misi yang dimiliki oleh pemerintah nagari mandeh.

Begitu juga pemerintah nagari yang mengurus perizinan kepada DKP Proponsi begitu juga pemerintah nagari sudah membuat/mempersiapkan *master Plan* yang telah dimiliki Nagari. Dalam perencanaan pembangunan tersebut, Walaupun saat sekarang ini nagari menunggu hasil dari perizinan lingkungan, apabila izin lingkungan tersebut selesai maka pembangunan akan dilaksanakan pada tahun ini, akan tetapi pada saat ini masih tertunda oleh perda provinsi

sumatera barat nomor 2 tahun 2018 pasal 41 (b). Perda tersebut telah direvisi dan akan disahkan pada tahun 2023, maka dari itu pembangunan wisata mangrove tersebut akan dilaksanakan apabila perda tersebut telah disahkan. Begitu juga dengan yang dilakukan oleh pemerintah nagari dalam penelitian ini dapat dilihat dari yang dilakukan oleh dinas pariwisata pesisir selatan yakni dengan membentuk Pokdarwis yang ada di pemerintahan nagari tersebut, begitu juga pelatihan yang dilakukan oleh dinas pariwisata pesisir selatan terhadap pokdarwis yang ada di nagari mandeh karena Pokdarwis yang juga akan langsung turun terhadap pembangunan wisata mangrove yang ada di nagari mandeh tersebut.

Dalam strategi dukungan sumberdaya dimana dalam hal tersebut pemerintah nagari mempunyai kendala dalam tenaga yang terampil atau pendidikan yang tinggi dalam meningkatkan produktifitas kinerja yang ada di nagari, terbukti dengan kurangnya tamatan S1 di pemerintahan nagari tersebut salah satu menjadi penghambat. Dan juga anggaran yang dimiliki pemerintah nagari mandeh itu dialih fungsikan dengan keadaan Covid 19, maka dari itu pemerintah nagari difasilitasi dengan pembangunan fisik wisata mangrove tersebut oleh DKP provinsi. Apabila pengerjaannya sudah selesai maka dari itu DKP akan memberikan sepenuhnya tanggungjawab terhadap pemerintah Nagari Mandeh dalam melakukan Pengelolaannya.

Selanjutnya yaitu dengan pola dari strategi kelembagaan bahwasanya yang dikemukakan kottan yakni adanya struktur dan peraturan standar operasional, dalam hal ini yakni belum adanya struktur yang digunakan dalam pembangunan wisata mangrove tersebut akan tetapi pada saat sekarang ini pemerintah nagari

memberikan sepenuhnya tanggung jawab kepada Bumhag yang mengelolanya apabila wisata mangrove tersebut telah rampung terlaksana, ataupun dengan SOP yang belum ada dikarenakan pembangunan wisata mangrove sendiri belum terlaksana.

6.2 Saran

Berdasarkan hasil dari temuan dan analisis data yang peneliti temukan selama berada di lapangan, maka terdapat beberapa saran yang ingin peneliti berikan, yaitu sebagai berikut:

1. Pemerintah nagari mandeh Untuk mewujudkan mangrove sebagai destinasi wisata dinagari mandeh tersebut maka dari itu pemerintah nagari mandeh harus berupaya semaksimal mungkin dengan menerapkan strategi yang dilakukannya harus sebaik mungkin. Sehingga dalam melakukan strategi yang dibuat tersebut pemerintah nagari supaya lebih agresif dalam menjalankannya, bila kita lihat bahwasanya tinggal izin lingkungan yang masih ditunda dengan adanya perda yang mengatur tentang lingkungan. Maka dari itu pemerintah nagari mandeh harus peka terhadap apa informasi yang didapat oleh DKP sebagai fasilitator dalam pembangunan wisata mangrove tersebut.
2. Begitu juga dengan SDM yang dimiliki oleh pemerintah nagari agar bisa mengetahui tentang pembangunan wisata mangrove tersebut. Dimana peranan yang dilakukan oleh dinas pariwisata pesisir selatan yang telah membimbing pemerintahan nagari yaitu melalui Pokdarwis

yang ada di nagari mandeh, supaya pelatihan yang akan diberikan dinas pariwisata tersebut bisa dimanfaatkan semaksimal mungkin, yakni dengan diberikan bekal tentang pengetahuan mangrove tersebut supaya dapat diterapkan dalam pelaksanaan pembangunan wisata mangrove tersebut.

3. Dan juga apabila nantinya pembangunan tersebut sudah terlealisasi, agar pemerintah nagari supaya dapat membuat struktur yang akan mengelola wisata mangrove tersebut, begitu juga aturan dan SOP yang mengatur tentang wisata mangrove tersebut.
4. Begitu juga dengan perizinan lingkungan agar dinas lingkungan hidup dapat memberikan perizinan, karena dengan adanya wisata mangrove tersebut masyarakat sekitar akan merasakan dampak yang sangat besar terhadap masyarakat di nagari mandeh tersebut apabila pembangunan wisata mangrove tersebut cepat selesai.

